



## **Manajemen Strategis Sistem Pendidikan Dalam Transisi Kurikulum Merdeka: Studi Kasus Di UPT SMPN 1 Kesamben**

**Hadi Prasetyo<sup>1</sup> Daniel Sudibyo Tjandra<sup>2</sup>**  
Sekolah Tinggi Teologi IKAT, Jakarta  
[danieljtjandra@sttikat.ac.id](mailto:danieljtjandra@sttikat.ac.id)\*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen strategis sistem pendidikan dalam transisi Kurikulum Merdeka di UPT SMPN 1 Kesamben Kabupaten Blitar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan manajemen strategis melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka. Sekolah membentuk tim implementasi kurikulum, melaksanakan pelatihan guru, serta menerapkan supervisi akademik secara berkala. Penerapan Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif terhadap keaktifan dan kreativitas peserta didik, namun masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman guru, beban administrasi, dan sarana digital. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan dan kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transisi kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

**Kata Kunci:** Manajemen Strategis, Kurikulum Merdeka, Transisi Kurikulum, Manajemen Pendidikan, Sekolah Menengah Pertama.

### **Abstract**

*This study aims to analyze the strategic management of the education system during the transition to the Merdeka Curriculum at UPT SMPN 1 Kesamben, Blitar Regency. The research employed a qualitative approach using a case study method. Data were collected through observation, interviews, and documentation, while data analysis used the Miles and Huberman model, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings revealed that the school implemented strategic management through planning, organizing, implementation, and evaluation stages of the Merdeka Curriculum. The school established a curriculum implementation team, conducted teacher training programs, and carried out regular academic supervision. The implementation of the Merdeka Curriculum had a positive impact on students' activeness and creativity in learning. However, several obstacles were identified, including limited teacher understanding of differentiated learning, increased administrative workload, and limited digital facilities. Therefore, continuous evaluation and the principal's leadership play important roles in supporting the successful curriculum transition and improving the quality of education in schools.*

**Keywords:** Strategic Management, Merdeka Curriculum, Curriculum Transition, Educational Management, Junior High School.

## PENDAHULUAN

Pendidikan nasional Indonesia saat ini berada pada fase transformasi yang sangat dinamis akibat perkembangan teknologi digital, globalisasi, perubahan sosial budaya, serta tuntutan kompetensi abad ke-21. Dunia pendidikan tidak lagi hanya dituntut menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan akademik semata, tetapi juga harus mampu membentuk karakter, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi yang baik. Perubahan tersebut mendorong lembaga pendidikan untuk melakukan penyesuaian secara sistematis melalui pengelolaan pendidikan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada masa depan.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, manajemen strategis menjadi salah satu pendekatan penting yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa sistem pendidikan mampu berjalan secara terarah dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman.

Manajemen strategis dalam sistem pendidikan merupakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai kebijakan pendidikan yang dilakukan secara menyeluruh guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen strategis tidak hanya berkaitan dengan penyusunan program, tetapi juga menyangkut kemampuan organisasi pendidikan dalam membaca tantangan lingkungan internal dan eksternal, menentukan visi dan misi yang relevan, serta membangun strategi yang tepat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, penerapan manajemen strategis sangat penting karena sekolah harus mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan karakteristik peserta didik yang terus berubah.<sup>2</sup>

Urgensi penerapan manajemen strategis dalam pendidikan sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pentingnya peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi manajemen pendidikan. Pendidikan nasional diarahkan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan mampu menghadapi tantangan global.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dituntut memiliki sistem pengelolaan yang profesional dan strategis agar mampu mencapai tujuan pendidikan

---

<sup>1</sup> E. P. I. H Baroya, *Strategi Pembelajaran Abad 21* (Yogyakarta: Lpmp Jogja. Jurnal Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. DIYogyakarta, 2018).

<sup>2</sup> Yakub Hendrawan Perangin Angin and Tri Astuti Yeniretnowati, "Penyelenggaraan Manajemen Sekolah Dan Pendidikan Perguruan Tinggi Kristen Berbasis Standar Iso 21001," *Discreet: Journal Didache of Christian Education* 2, no. 1 (June 2022): 41–62, <https://doi.org/10.52960/jd.v2i1.111>.

<sup>3</sup> Tim Rendaks, *Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, (Jakarta: Trasmedia Pustaka, 2019).

nasional tersebut. Tanpa manajemen strategis yang baik, kebijakan pendidikan sering kali mengalami kendala dalam implementasi sehingga tidak memberikan hasil yang optimal.

Salah satu bentuk transformasi pendidikan nasional yang saat ini menjadi perhatian utama adalah implementasi Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka hadir sebagai respons pemerintah terhadap berbagai tantangan pendidikan, terutama setelah terjadinya learning loss akibat pandemi Covid-19. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks lingkungan sekolah. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, penguatan karakter melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), pembelajaran diferensiasi, serta penyederhanaan materi agar peserta didik dapat memahami konsep secara lebih mendalam.<sup>4</sup> Penerapan Kurikulum Merdeka diatur dalam berbagai kebijakan pemerintah, salah satunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa Kurikulum Merdeka dikembangkan berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis untuk membentuk peserta didik yang mandiri, kreatif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Kurikulum ini juga memberikan ruang yang lebih luas kepada guru untuk mengembangkan metode pembelajaran inovatif yang relevan dengan kebutuhan peserta didik.<sup>5</sup>

Meskipun demikian, implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan tidak selalu berjalan secara optimal. Banyak sekolah menghadapi berbagai tantangan dalam proses transisi dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka. Tantangan tersebut meliputi kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru yang masih memerlukan pelatihan dan pendampingan terkait konsep pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, dan penyusunan modul ajar. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana, akses teknologi, perubahan budaya kerja sekolah, serta kesiapan peserta didik dan orang tua juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum baru ini.<sup>6</sup> Kondisi transisi kurikulum menjadi semakin kompleks ketika sekolah harus menerapkan dua kurikulum secara bersamaan. Situasi tersebut menuntut kemampuan manajemen strategis yang baik agar proses pendidikan tetap berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan bagi guru

---

<sup>4</sup> Lisa Maulidia et al., "Analisis Keterampilan Abad Ke 21 Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Negeri 2 Bajarsari," *Seminar Nasional (PROSPEK II)*, no. Prospek Ii (2023): 127–33.

<sup>5</sup> Maulidia et al.

<sup>6</sup> Prisca Regina Rani et al., "Kurikulum Merdeka : Transformasi Pembelajaran Yang Relevan, Sederhana, Dan Fleksibel," *Journal of Information System and Management* 02, no. 06 (2023): 78–84.

maupun peserta didik. Sekolah harus mampu menyusun strategi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi yang tepat agar sinkronisasi antar jenjang kelas dapat berlangsung secara harmonis. Dalam konteks inilah peran kepala sekolah sebagai pemimpin strategis menjadi sangat penting dalam mengarahkan seluruh elemen sekolah untuk beradaptasi terhadap perubahan kebijakan pendidikan.<sup>7</sup>

UPT SMPN 1 Kesamben Kabupaten Blitar merupakan salah satu sekolah negeri yang sedang mengalami proses transisi penerapan Kurikulum Merdeka. Berdasarkan profil sekolah tahun 2022, sekolah ini memiliki jumlah peserta didik sebanyak 953 siswa dengan dukungan 55 tenaga pendidik dan kependidikan. Sekolah ini juga memiliki rombongan belajar yang memadai serta fasilitas pendidikan yang relatif lengkap, meskipun masih ditemukan beberapa sarana seperti meja dan kursi yang mengalami kerusakan. Selain itu, sekolah telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 yang menunjukkan adanya komitmen terhadap penerapan sistem manajemen mutu dalam pengelolaan pendidikan. Dalam implementasinya, UPT SMPN 1 Kesamben menerapkan dualisme kurikulum, yaitu Kurikulum Merdeka untuk kelas VII dan VIII, sedangkan kelas IX masih menggunakan Kurikulum 2013. Kebijakan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan transisi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan sekolah harus mampu mengelola dua sistem pembelajaran dengan karakteristik yang berbeda secara bersamaan. Kurikulum 2013 lebih berorientasi pada pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terstruktur, sedangkan Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik. Perbedaan tersebut menuntut kesiapan manajemen sekolah dalam mengatur perangkat pembelajaran, penjadwalan, evaluasi, hingga pengembangan kompetensi guru.

Di sisi lain, implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah juga memerlukan dukungan budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif. Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam merancang pembelajaran yang kontekstual dan menyenangkan. Kepala sekolah perlu membangun komunikasi yang efektif dengan seluruh warga sekolah agar proses perubahan dapat diterima secara positif. Apabila manajemen strategis tidak diterapkan secara optimal, maka proses transisi kurikulum berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti

---

<sup>7</sup> Urbanus Sukri and Yamotani Waruwu, "Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Melalui Kurikulum Merdeka," *Inculco Journal of Christian Education* 4, no. 3 (September 9, 2024): 293–313, <https://doi.org/10.59404/ijce.v4i3.221>.

rendahnya efektivitas pembelajaran, kebingungan administrasi, ketidaksesuaian evaluasi pembelajaran, hingga menurunnya kualitas layanan pendidikan.<sup>8</sup>

Penelitian mengenai implementasi Kurikulum Merdeka sebenarnya telah dilakukan di berbagai daerah dan jenjang pendidikan. Beberapa penelitian menyoroti efektivitas implementasi kurikulum menggunakan model evaluasi tertentu maupun peran kepemimpinan kepala sekolah dalam mendukung keberhasilan perubahan kurikulum. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas manajemen strategis sistem pendidikan dalam konteks transisi penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah menengah pertama negeri, khususnya di wilayah Kabupaten Blitar, masih relatif terbatas. Padahal setiap sekolah memiliki karakteristik, budaya organisasi, sumber daya, dan tantangan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan strategis yang kontekstual. Keterbatasan kajian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih mendalam. Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi manajemen strategis dilakukan dalam menghadapi transisi kurikulum di tingkat sekolah. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kurikulum Merdeka serta menganalisis efektivitas penerapannya terhadap kualitas proses pendidikan di sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian tentang manajemen strategis sistem pendidikan dalam transisi Kurikulum Merdeka di UPT SMPN 1 Kesamben Kabupaten Blitar menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi sekolah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan pendidikan selama masa transisi kurikulum. Selain itu, hasil penelitian juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi dinas pendidikan serta memperkaya kajian ilmiah di bidang manajemen pendidikan, khususnya terkait implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis manajemen strategis sistem pendidikan dalam transisi Kurikulum Merdeka di UPT SMPN 1 Kesamben Kabupaten Blitar. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta

---

<sup>8</sup> Jein Paelongan et al., "Integrasi Nilai Kristiani Dan Literasi Digital Dalam Pendidikan Agama Kristen," *Cendikia: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 3 (2024): 454–74.

dinamika yang terjadi dalam implementasi Kurikulum Merdeka di lingkungan sekolah. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik yang terlibat langsung dalam proses transisi kurikulum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah, sedangkan wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai strategi, kendala, dan upaya sekolah dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen kurikulum, modul ajar, program sekolah, dan laporan evaluasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil dan Kesiapan UPT SMPN 1 Kesamben dalam Transisi Kurikulum Merdeka**

Berdasarkan hasil analisis dokumen profil sekolah tahun 2022, UPT SMPN 1 Kesamben Kabupaten Blitar merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang memiliki kapasitas kelembagaan cukup baik dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Sekolah ini memiliki jumlah peserta didik sebanyak 953 siswa dengan dukungan 55 tenaga pendidik dan kependidikan. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa rasio guru dan siswa berada pada kondisi yang relatif ideal sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan terarah. Ketersediaan tenaga pendidik yang memadai menjadi modal penting bagi sekolah dalam menghadapi proses perubahan kurikulum yang menuntut fleksibilitas, kreativitas, dan kemampuan adaptasi guru terhadap pendekatan pembelajaran baru.

Dari aspek sarana dan prasarana, sekolah memiliki fasilitas pembelajaran yang tergolong lengkap untuk menunjang kegiatan akademik maupun nonakademik. Ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta fasilitas penunjang lainnya tersedia dalam kondisi yang cukup baik. Namun demikian, hasil observasi dan analisis dokumen menunjukkan masih terdapat beberapa kerusakan minor pada sarana pembelajaran seperti meja dan kursi siswa. Walaupun kerusakan tersebut tidak secara langsung menghambat proses pembelajaran, kondisi ini tetap memerlukan perhatian agar kualitas lingkungan belajar peserta didik tetap nyaman dan kondusif. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, sarana pembelajaran

menjadi faktor penting karena pembelajaran berbasis proyek dan aktivitas kolaboratif membutuhkan ruang belajar yang mendukung interaksi aktif peserta didik.

Salah satu kekuatan utama UPT SMPN 1 Kesamben adalah telah diterapkannya sistem manajemen mutu melalui sertifikasi ISO 9001:2008. Sertifikasi tersebut menunjukkan bahwa sekolah memiliki budaya organisasi yang berorientasi pada mutu, efektivitas kerja, serta pengelolaan administrasi yang sistematis. Penerapan standar mutu ini menjadi modal strategis dalam mendukung proses transisi Kurikulum Merdeka karena sekolah telah terbiasa dengan pola kerja terencana, evaluasi berkala, dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu, pengesahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) tahun 2022 oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan dinas pendidikan menunjukkan bahwa perencanaan anggaran sekolah dilakukan secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak terkait. Hal ini mencerminkan adanya tata kelola pendidikan yang cukup baik dalam mendukung program pengembangan sekolah.

Meskipun demikian, hasil analisis data sekunder menunjukkan bahwa tingkat kesiapan sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka masih berada pada kategori sedang. Sekolah telah melakukan persiapan awal terkait penyusunan isi kurikulum, perangkat pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru, namun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Beberapa tantangan masih ditemukan, terutama dalam pengorganisasian pembelajaran yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 262/M/2022. Permasalahan tersebut terlihat pada pengaturan alokasi waktu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dan penerapan pembelajaran intrakurikuler yang belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses transisi kurikulum membutuhkan adaptasi yang bertahap, baik dari sisi manajemen sekolah maupun kesiapan guru dalam menerapkan paradigma pembelajaran baru.

### **Perencanaan Strategis Implementasi Kurikulum Merdeka**

UPT SMPN 1 Kesamben Kabupaten Blitar menerapkan perencanaan strategis sebagai langkah awal dalam mendukung keberhasilan transisi menuju Kurikulum Merdeka. Perencanaan dilakukan secara sistematis melalui rapat koordinasi sekolah yang melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan. Kegiatan koordinasi tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh warga sekolah mengenai arah kebijakan kurikulum baru sekaligus menyusun langkah-langkah implementasi yang sesuai dengan kondisi sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin strategis yang

mengarahkan proses perencanaan agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan sekolah.

Dalam proses perencanaan, sekolah menyusun program implementasi Kurikulum Merdeka secara bertahap dan terstruktur. Program tersebut meliputi pembagian tugas guru sesuai kompetensi masing-masing, penyusunan perangkat pembelajaran, pengembangan modul ajar, penyesuaian jadwal pembelajaran, serta pengintegrasian Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) ke dalam kegiatan sekolah. Penyusunan perangkat pembelajaran dilakukan melalui forum diskusi guru agar terjadi kesamaan pemahaman terkait capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru juga diarahkan untuk mulai menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi sesuai karakteristik dan kebutuhan siswa. Selain itu, sekolah merancang berbagai program pelatihan internal untuk meningkatkan kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Pelatihan tersebut mencakup pemahaman konsep pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, penyusunan modul ajar, serta strategi pembelajaran berbasis proyek. Program ini dilakukan secara berkala melalui kegiatan workshop, komunitas belajar guru, dan supervisi akademik yang dipimpin oleh kepala sekolah maupun guru penggerak. Langkah tersebut menunjukkan bahwa sekolah berupaya membangun budaya belajar bersama guna meningkatkan kompetensi profesional guru dalam menghadapi perubahan kurikulum.

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan strategis menjadi fondasi penting dalam keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah. Perencanaan yang matang membantu sekolah meminimalkan hambatan selama proses transisi, baik dalam aspek administrasi, pelaksanaan pembelajaran, maupun kesiapan sumber daya manusia. Selain itu, perencanaan strategis juga menciptakan arah kebijakan yang jelas sehingga seluruh warga sekolah memiliki pemahaman yang sama terhadap tujuan perubahan kurikulum. Dengan adanya perencanaan yang terstruktur, sekolah dapat menjalankan proses implementasi Kurikulum Merdeka secara lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan pendidikan abad ke-21.

### **Pengorganisasian dan Pembentukan Tim Kurikulum**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT SMPN 1 Kesamben Kabupaten Blitar melakukan pengorganisasian implementasi Kurikulum Merdeka melalui pembentukan tim khusus yang bertugas mengoordinasikan seluruh kegiatan akademik dan administrasi pembelajaran. Pembentukan tim implementasi Kurikulum Merdeka dilakukan sebagai

langkah strategis untuk memastikan proses transisi kurikulum berjalan secara terarah, efektif, dan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tim tersebut terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru mata pelajaran, wali kelas, serta beberapa tenaga kependidikan yang memiliki peran dalam mendukung administrasi sekolah.

Tim implementasi Kurikulum Merdeka memiliki tanggung jawab dalam mengatur berbagai aspek pembelajaran, seperti penyusunan jadwal pelajaran, pengelolaan perangkat pembelajaran, pelaksanaan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), hingga evaluasi pelaksanaan kurikulum secara berkala. Pengaturan jadwal pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik antara Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013 yang masih diterapkan secara bersamaan di beberapa tingkat kelas. Selain itu, tim juga bertugas memastikan bahwa perangkat pembelajaran yang digunakan guru telah sesuai dengan capaian pembelajaran dan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Dalam pelaksanaannya, guru menunjukkan keterlibatan aktif melalui kegiatan kolaborasi dan diskusi bersama. Guru secara rutin melakukan berbagi praktik baik terkait penerapan metode pembelajaran inovatif, penyusunan modul ajar, penggunaan media pembelajaran digital, serta strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kegiatan kolaboratif tersebut dilakukan melalui rapat guru, komunitas belajar, workshop internal, dan supervisi akademik. Melalui kegiatan tersebut, guru memperoleh kesempatan untuk saling bertukar pengalaman dan solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi selama proses implementasi Kurikulum Merdeka.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengorganisasian yang baik mampu menciptakan koordinasi kerja yang lebih efektif antarwarga sekolah. Pembagian tugas yang jelas membantu setiap anggota tim memahami tanggung jawab masing-masing sehingga proses implementasi kurikulum dapat berjalan lebih sistematis. Selain itu, kolaborasi antar guru turut memperkuat budaya organisasi sekolah yang adaptif terhadap perubahan. Budaya kerja yang kolaboratif tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transisi kurikulum karena perubahan kebijakan pendidikan membutuhkan keterlibatan dan komitmen seluruh warga sekolah. Secara keseluruhan, pengorganisasian dan pembentukan tim kurikulum di UPT SMPN 1 Kesamben menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya bergantung pada kebijakan formal, tetapi juga pada kemampuan sekolah membangun koordinasi, komunikasi, dan kerja sama yang efektif. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan budaya kolaboratif yang kuat, proses perubahan kurikulum dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan berkelanjutan.

### **Pelaksanaan Dualisme Kurikulum**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT SMPN 1 Kesamben Kabupaten Blitar menerapkan dualisme kurikulum dalam proses pembelajaran, yaitu penggunaan Kurikulum Merdeka pada kelas VII dan VIII, sedangkan kelas IX masih menggunakan Kurikulum 2013. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari masa transisi implementasi kurikulum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kondisi ini menyebabkan sekolah harus mengelola dua sistem pembelajaran dengan karakteristik, perangkat administrasi, dan pendekatan pembelajaran yang berbeda secara bersamaan. Oleh karena itu, sekolah dituntut memiliki kesiapan manajemen yang baik agar proses pembelajaran tetap berjalan efektif dan tidak menimbulkan kebingungan bagi guru maupun peserta didik.

Dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka, pembelajaran lebih menekankan pada keaktifan peserta didik melalui pendekatan yang berpusat pada siswa. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik untuk aktif mencari, memahami, dan mengembangkan pengetahuan secara mandiri. Pembelajaran juga dilakukan melalui kegiatan berbasis proyek yang diintegrasikan dalam Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun karakter peserta didik melalui pengalaman belajar yang kontekstual, kolaboratif, dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari.

Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta didik pada kelas yang menerapkan Kurikulum Merdeka terlihat lebih aktif dalam proses pembelajaran. Siswa lebih berani menyampaikan pendapat, terlibat dalam diskusi kelompok, serta mampu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas proyek. Pembelajaran berbasis proyek juga membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi yang menjadi bagian dari kompetensi abad ke-21. Selain itu, suasana pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan interaktif karena guru diberikan kebebasan untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan serta karakteristik peserta didik. Meskipun demikian, penerapan dualisme kurikulum juga menimbulkan beberapa tantangan dalam pengelolaan pendidikan di sekolah. Guru harus menyesuaikan perangkat pembelajaran, metode pengajaran, sistem penilaian, dan administrasi akademik sesuai dengan kurikulum yang digunakan pada masing-masing tingkat kelas. Perbedaan struktur kurikulum tersebut menyebabkan meningkatnya beban administrasi guru karena harus menyusun perangkat pembelajaran yang berbeda secara bersamaan. Selain itu, sekolah juga perlu melakukan penyesuaian jadwal pembelajaran, pengelolaan asesmen, dan pelaporan hasil belajar agar tetap sesuai dengan ketentuan masing-masing kurikulum.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Kurikulum Merdeka memberikan perubahan positif terhadap proses pembelajaran karena lebih fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Namun, pelaksanaan dualisme kurikulum memerlukan kesiapan administrasi dan manajemen sekolah yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi yang baik, dukungan kepemimpinan sekolah, serta peningkatan kompetensi guru agar proses transisi kurikulum dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

### **Kendala Implementasi Kurikulum Merdeka**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka di UPT SMPN 1 Kesamben Kabupaten Blitar masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek sumber daya manusia, administrasi, maupun sarana pendukung pembelajaran. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep pembelajaran berdiferensiasi. Sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik peserta didik yang beragam. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Selain itu, guru juga mengalami kesulitan dalam penyusunan modul ajar dan perangkat pembelajaran. Perubahan format pembelajaran dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk lebih kreatif dan mandiri dalam merancang kegiatan pembelajaran yang fleksibel, kontekstual, dan berpusat pada peserta didik. Namun, tidak semua guru memiliki pengalaman dan keterampilan yang memadai dalam menyusun modul ajar berbasis capaian pembelajaran. Akibatnya, beberapa guru masih membutuhkan pendampingan dan pelatihan lebih lanjut agar mampu menyusun perangkat pembelajaran secara efektif.

Kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan sarana dan prasarana digital yang mendukung pembelajaran. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, penggunaan teknologi menjadi bagian penting dalam menunjang proses pembelajaran inovatif dan interaktif. Akan tetapi, fasilitas teknologi di sekolah masih belum sepenuhnya memadai, terutama dalam hal perangkat pembelajaran digital dan akses internet yang stabil. Kondisi tersebut menjadi hambatan bagi guru dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi dan mengoptimalkan penggunaan platform digital dalam proses belajar mengajar. Di sisi administrasi, penerapan dualisme kurikulum juga menyebabkan meningkatnya beban kerja guru dan tenaga kependidikan. Guru harus menyusun perangkat pembelajaran, sistem

penilaian, dan laporan administrasi yang berbeda antara Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013. Hal ini menimbulkan tambahan pekerjaan administratif yang cukup kompleks dan membutuhkan ketelitian tinggi. Selain itu, perubahan budaya kerja sekolah menuju sistem pembelajaran yang lebih fleksibel dan kolaboratif juga memerlukan proses adaptasi yang tidak singkat. Sebagian guru masih terbiasa dengan pola pembelajaran konvensional sehingga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan paradigma baru dalam Kurikulum Merdeka. Kendala-kendala tersebut merupakan tantangan umum yang sering muncul dalam proses perubahan kebijakan pendidikan. Implementasi kurikulum baru tidak hanya berkaitan dengan perubahan dokumen pembelajaran, tetapi juga menyangkut perubahan pola pikir, budaya kerja, dan kemampuan profesional guru. Oleh sebab itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Semakin baik kompetensi, kesiapan, dan kemampuan adaptasi guru, maka semakin besar peluang keberhasilan sekolah dalam melaksanakan perubahan kurikulum secara efektif dan berkelanjutan.

### **Strategi Sekolah dalam Mengatasi Hambatan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT SMPN 1 Kesamben Kabupaten Blitar melakukan berbagai strategi untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Strategi tersebut dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh warga sekolah agar proses transisi kurikulum dapat berjalan lebih efektif. Salah satu strategi utama yang diterapkan sekolah adalah pelaksanaan pelatihan internal dan workshop kurikulum bagi guru. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman guru terkait konsep Kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, penyusunan modul ajar, serta penerapan pembelajaran berbasis proyek dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Selain pelatihan internal, sekolah juga menerapkan supervisi akademik secara berkala sebagai bentuk pendampingan profesional kepada guru. Supervisi dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk memantau pelaksanaan pembelajaran sekaligus memberikan masukan terhadap kendala yang dihadapi guru di kelas. Melalui supervisi tersebut, guru memperoleh arahan terkait strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka. Pendampingan guru juga dilakukan melalui forum diskusi, komunitas belajar, dan kegiatan berbagi praktik baik antarguru sehingga tercipta budaya kerja yang lebih kolaboratif.

Dalam upaya memperkuat implementasi kurikulum, sekolah juga meningkatkan komunikasi antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua peserta didik.

Kepala sekolah secara aktif melakukan koordinasi dan membangun komunikasi yang terbuka agar setiap perubahan kebijakan dapat dipahami bersama. Komunikasi dengan orang tua dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai perubahan sistem pembelajaran dan pentingnya dukungan keluarga dalam proses belajar peserta didik. Dengan adanya komunikasi yang baik, sekolah dapat menciptakan kerja sama yang lebih harmonis dalam mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting sebagai pemimpin strategis dalam menghadapi perubahan kurikulum. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga sebagai motivator dan fasilitator bagi guru dalam menghadapi tantangan implementasi kurikulum baru. Kepala sekolah secara aktif memberikan motivasi, arahan, dan evaluasi berkala terhadap proses pembelajaran agar guru tetap memiliki semangat dan kesiapan dalam menjalankan perubahan sistem pendidikan. Evaluasi dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi dan refleksi pembelajaran untuk mengetahui perkembangan implementasi kurikulum serta mencari solusi terhadap berbagai kendala yang muncul. Keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka sangat dipengaruhi oleh efektivitas kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan yang komunikatif, adaptif, dan kolaboratif mampu menciptakan perubahan organisasi yang lebih efektif. Dukungan komunikasi yang intensif serta pembinaan berkelanjutan membantu meningkatkan kompetensi dan kesiapan guru dalam menghadapi transisi kurikulum. Dengan demikian, strategi sekolah yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka di lingkungan sekolah.

### **Evaluasi Manajemen Strategis dalam Transisi Kurikulum**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT SMPN 1 Kesamben Kabupaten Blitar melaksanakan evaluasi secara berkala sebagai bagian dari penerapan manajemen strategis dalam transisi Kurikulum Merdeka. Evaluasi dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti supervisi pembelajaran, rapat evaluasi rutin, monitoring administrasi pembelajaran, serta refleksi pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Kegiatan evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Kurikulum Merdeka telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sekolah. Supervisi pembelajaran dilakukan oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dengan cara mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas. Melalui supervisi ini, sekolah dapat mengetahui kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran

berdiferensiasi, penggunaan metode pembelajaran inovatif, serta keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Hasil supervisi kemudian dijadikan dasar untuk memberikan masukan, pembinaan, dan rekomendasi perbaikan kepada guru agar kualitas pembelajaran dapat terus meningkat.

Selain supervisi, sekolah juga melaksanakan rapat evaluasi secara rutin yang melibatkan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan Kurikulum Merdeka, seperti kesulitan penyusunan modul ajar, pengelolaan administrasi pembelajaran, pelaksanaan asesmen, dan pengaturan kegiatan P5. Melalui forum evaluasi ini, sekolah berupaya mencari solusi bersama terhadap berbagai hambatan yang dihadapi sehingga implementasi kurikulum dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Monitoring administrasi pembelajaran juga menjadi bagian penting dalam proses evaluasi. Sekolah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan perangkat pembelajaran, jadwal pelajaran, dokumen asesmen, dan laporan hasil belajar peserta didik. Monitoring ini bertujuan memastikan bahwa seluruh administrasi pembelajaran telah sesuai dengan ketentuan Kurikulum Merdeka dan standar pengelolaan pendidikan yang berlaku. Selain itu, refleksi kegiatan P5 dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan program dalam membentuk karakter, kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan sosial peserta didik. Evaluasi berkelanjutan merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen strategis pendidikan. Evaluasi tidak hanya berfungsi untuk mengukur keberhasilan program, tetapi juga menjadi sarana perbaikan dan pengembangan sistem pendidikan secara berkesinambungan. Dengan adanya evaluasi yang dilakukan secara sistematis, sekolah dapat mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi Kurikulum Merdeka sehingga mampu menentukan langkah perbaikan yang tepat. Evaluasi yang berkelanjutan juga membantu sekolah meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan, memperkuat efektivitas pembelajaran, serta mendukung keberhasilan transisi kurikulum secara lebih optimal dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan transisi Kurikulum Merdeka di UPT SMPN 1 Kesamben Kabupaten Blitar. Sekolah telah melaksanakan fungsi manajemen strategis melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi secara sistematis. Perencanaan dilakukan melalui koordinasi antara kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dalam menyusun program implementasi Kurikulum Merdeka, perangkat pembelajaran, serta kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Pengorganisasian dilakukan melalui pembentukan tim implementasi kurikulum yang

mendukung koordinasi dan kolaborasi antar guru secara efektif. Pelaksanaan dualisme kurikulum menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif terhadap pembelajaran karena lebih fleksibel dan berpusat pada peserta didik. Namun demikian, sekolah masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman guru terhadap pembelajaran berdiferensiasi, meningkatnya beban administrasi, serta keterbatasan sarana digital. Untuk mengatasi hambatan tersebut, sekolah menerapkan berbagai strategi, seperti pelatihan internal, supervisi akademik, pendampingan guru, dan penguatan komunikasi organisasi. Evaluasi yang dilakukan secara berkala melalui supervisi, monitoring, dan refleksi program menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka serta kualitas pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Angin, Yakub Hendrawan Perangin, and Tri Astuti Yeniretnowati. "Penyelenggaraan Manajemen Sekolah Dan Pendidikan Perguruan Tinggi Kristen Berbasis Standar Iso 21001." *Discreet: Journal Didache of Christian Education* 2, no. 1 (June 2022): 41–62. <https://doi.org/10.52960/jd.v2i1.111>.
- Baroya, E. P. I. H. *Strategi Pembelajaran Abad 21*. Yogyakarta: Lpmp Jogja. Jurnal Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. DIYogyakarta, 2018.
- Maulidia, Lisa, Tia Nafaridah, Ahmad, Ratumbusang. Monry FN, and Eva Maya Sari. "Analisis Keterampilan Abad Ke 21 Melalui Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di SMA Negeri 2 Bajarsari." *Seminar Nasional (PROSPEK II)*, no. Prospek Ii (2023): 127–33.
- Paelongan, Jein, Serli Lambertus, Milka, Welsianti Tumonglo, and Rani Ta'dung. "Integrasi Nilai Kristiani Dan Literasi Digital Dalam Pendidikan Agama Kristen." *Cendikia: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 3 (2024): 454–74.
- Rani, Prisca Regina, Masduki Asbari, Vincensius Ananta, and Ilham Alim. "Kurikulum Merdeka: Transformasi Pembelajaran Yang Relevan, Sederhana, Dan Fleksibel." *Journal of Information System and Management* 02, no. 06 (2023): 78–84.
- Sukri, Urbanus, and Yamotani Waruwu. "Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen Melalui Kurikulum Merdeka." *Inculco Journal of Christian Education* 4, no. 3 (September 9, 2024): 293–313. <https://doi.org/10.59404/ijce.v4i3.221>.
- Tim Rendaks. *Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Dan Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen*, (Jakarta: Trasmedia Pustaka, 2019).